

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan komunitas etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan diketahui sejak abad ke-18. Perpindahan ini dimulai sejak tahun 1667 pada saat perjanjian Bongaya di tandatangani, hingga pada abad ke-18. Diaspora yang tercatat oleh Belanda yaitu perjalanan kelompok bangsawan dari kerajaan Gowa-Tallo, yakni Karaeng Galesong, Karaeng Bontomarannu, Daeng Mangappa dan Daeng Mangika yang pergi ke penjuru wilayah Jawa dan Sumatra. Pada masa selanjutnya diikuti oleh serangan VOC ke Kerajaan Wajo dalam upaya mencegah pemberontakan yang mungkin terjadi. Kehancuran Tosora akhirnya memaksa mereka untuk mengungsi ke luar daerah menuju ke wilayah semenanjung Malaysia. Bukti diaspora kelompok ini tercatat dalam tuhfah dan tulisan Silsilah Melayu dan Bugis, mendeskripsikan tentang orang Bugis yang mendirikan sistem sosialnya di wilayah Johor (Andaya, 1995).

Kekalahan yang dialami oleh Kerajaan Gowa-Tallo oleh Belanda pada abad ke-17 menjadi awal dari pesatnya pengaruh kolonialisme di Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh Cornelis Speelman, VOC berhasil mengambil alih kekuasaan di wilayah kerajaan Gowa-Tallo. Kekalahan ini memaksa Gowa-Tallo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin untuk menyetujui perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini berisi tentang hak komersialisasi dan monopoli VOC terhadap Gowa-Tallo serta Kerajaan-kerajaan yang tunduk dibawahnya. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kian memanas itu akhirnya mendorong sebagian masyarakat Sulawesi Selatan untuk pergi meninggalkan daerahnya secara berkelompok (diaspora). Mereka menyebar ke berbagai penjuru wilayah Nusantara, bahkan hingga ke Asia Tenggara (1995). Perpindahan ini dimulai sejak tahun 1667 pada saat perjanjian Bongaya di tandatangani, hingga pada abad ke-18. Diaspora yang tercatat oleh Belanda yaitu perjalanan kelompok bangsawan dari kerajaan Gowa-Tallo, yakni Karaeng Galesong, Karaeng Bontomarannu, Daeng Mangappa dan Daeng Mangika yang pergi ke penjuru wilayah Jawa dan Sumatra. Pada masa selanjutnya diikuti oleh serangan VOC ke Kerajaan Wajo dalam upaya mencegah pemberontakan yang mungkin terjadi. Kehancuran Tosora akhirnya memaksa mereka untuk mengungsi ke luar daerah menuju ke wilayah semenanjung Malaysia. Bukti diaspora kelompok ini tercatat dalam tuhfah dan tulisan Silsilah Melayu dan Bugis, mendeskripsikan tentang orang Bugis yang mendirikan sistem sosialnya di wilayah Johor (Andaya, 1995).

Pulau Kalimantan merupakan salah satu tempat yang menjadi lokasi berdiasporanya masyarakat Bugis dari tanah Sulawesi. Cerita mengenai kedatangan orang Bugis yang berdiaspora ke Kalimantan Selatan memiliki beberapa versi (Mansyur, 2012). Menurut Eisenberger (1936) dijelaskan bahwa pada tahun 1750, Pagatan didirikan oleh orang Bugis. Versi kedua, menurut penelitian C. Nagtegaal (1939) menyebutkan bahwa Pagatan dibangun pada pertengahan abad ke-18 oleh seorang pedagang Bugis bernama Puanna Dekke dari Wajo, dengan izin Sultan

Banjarmasin. Pendapat ketiga terdapat dalam Lontara Kapitan La Mattone mencatat bahwa pada tahun 1735, seorang pedagang Bugis dari Wajo bernama Puanna Dekke memimpin kedatangan mereka di Pagatan. Tahun 1735 adalah masa dibentuknya Kerajaan Pagatan, sesuai dengan versi Lontara Kapitan La Mattone. Jika dibandingkan dengan tahun pelayaran La Maddukelleng ke Pasir pada tahun 1726 (menurut Lontara Sukku'na Wajo), rentang waktunya tidak terlalu jauh. Berawal dari Kampoeng Pagattang, akhirnya terbentuk identitas '*To-Ugi*' yang menjadi ciri khas orang Bugis di Pagatan. Identitas ini terwujud dalam pengaturan pemerintahan internal di Kampoeng Pagattang (Muller, 1857 KITLV, Inventaris No. 1234, 1892). Meskipun Puanna Dekke menjadi pionir yang membuka dan mengembangkan kampung Bugis tersebut, ia tidak ingin menjadi raja. Maka dari itu Puanna Dekke mengundang saudaranya Pua Janggo dan La Pagala dari Kalimantan bagian barat untuk membahas pemimpin Bugis yang dapat mengatur kampung ini. Setelah perundingan, ketiga bersaudara sepakat untuk mempersiapkan Hasan La Pangewa (La Pangewa) sebagai calon raja pertama Pagatan. Hasan La Pangewa merupakan keturunan salah satu Raja Kampiri di Wajo, yaitu Datu Lompulle

Salah satu jejak sejarah yang memiliki nilai penting di wilayah Kalimantan Selatan adalah keberadaan Kerajaan Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kerajaan ini memiliki keunikan sosiologis dan historis karena didirikan oleh komunitas migran Bugis di bawah pimpinan La Pangewa pada abad ke-18, atas izin dari Sultan Banjar, Sultan Tahmidullah II (Usman, 1994). Peninggalan kerajaan ini, mulai dari kompleks makam raja-raja hingga artefak keseharian, merepresentasikan perpaduan budaya maritim Bugis dan Banjar yang sangat kuat di pesisir Kalimantan (Sunarningsih, 2013).

Namun, seiring berjalannya waktu, peninggalan arkeologi Kerajaan Pagatan menghadapi ancaman serius. Secara fisik, letak geografis Pagatan yang berada di wilayah pesisir dikhawatirkan dapat membuatnya rentan terhadap proses alamiah seperti abrasi dan perubahan iklim (Mundardjito, 2002). Di sisi lain, tekanan pembangunan infrastruktur dalam wilayah Pagatan di masa sekarang dan kurangnya edukasi terhadap pentingnya sisa-sisa struktur bangunan masa lalu dapat menyebabkan hilangnya data arkeologi secara permanen sebelum sempat diteliti secara mendalam. Masalah utama yang ditemukan adalah belum tersedianya pendataan yang terintegrasi secara spasial; informasi mengenai letak situs, deskripsi objek, dan foto pendukung masih tersebar dan sulit diakses oleh publik maupun akademisi.

Menghadapi tantangan tersebut, disiplin arkeologi kini mulai mengadopsi teknologi informasi melalui pendekatan Arkeologi Digital. Menurut Zubrow (2006), arkeologi digital bukan sekadar penggunaan perangkat elektronik, melainkan metode untuk menciptakan replika data yang presisi guna kepentingan preservasi. Salah satu instrumen terpenting dalam arkeologi digital adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Penggunaan SIG memungkinkan arkeolog untuk memetakan distribusi temuan secara akurat dan menyajikannya dalam bentuk peta informatif (Wheatley & Gillings, 2002).

Preservasi digital menjadi langkah krusial bagi Kerajaan Pagatan. Dengan mendokumentasikan setiap objek arkeologi ke dalam peta digital yang mencakup kategori objek, penanggalan, deskripsi, serta foto terkini, peneliti dapat menciptakan sebuah "arsip digital" yang abadi. Hal ini sejalan dengan konsep *Cultural heritage management* yang menekankan bahwa informasi mengenai masa lalu harus dikelola agar tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Lebih jauh lagi, upaya preservasi digital ini merupakan manifestasi dari penerapan paradigma Arkeologi Publik. Menurut Tanudirjo (2003), arkeologi publik menekankan pentingnya aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat luas dalam upaya pelestarian sumber daya budaya. Melalui pandangan ini, arkeologi tidak lagi hanya menjadi konsumsi para ahli di laboratorium, melainkan harus dikembalikan kepada publik sebagai pemilik sah sejarah tersebut melalui penyediaan informasi yang komunikatif. Penggunaan media digital dalam pemetaan situs Kerajaan Pagatan berfungsi sebagai sarana demokratisasi informasi, di mana pengetahuan arkeologi yang bersifat teknis diubah menjadi data visual yang mudah dipahami, sehingga mampu menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga situs tersebut (Merriman, 2004).

## 1.2 Rumusan Masalah

Wilayah pesisir Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, telah banyak diteliti. Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa tinggalan masyarakat komunitas etnik Bugis Pagatan ini masih dapat ditemui hingga saat ini dan tersebar di wilayah pesisir yang diketahui sebagai pusat komunitas etnik Bugis Pagatan yang berdiaspora sejak abad ke-18 Masehi. Meskipun warisan budaya tersebut masih dapat ditemui saat ini, pada faktanya kondisi warisan budaya mengalami penurunan bahkan berpotensi kehilangan konteksnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Andi Satria Jaya (58) di tahun 2023 bahwa pernah terjadi pemindahan objek dari lokasi asli ke tempat lain. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila terus terjadi perubahan kondisi maupun pergeseran objek tinggalan budaya dari lokasi aslinya, maka lambat laun kekaburan warisan budaya tidak lagi dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Permasalahan yang muncul bagaimana kondisi eksisting warisan budaya komunitas Etnis Bugis Pagatan dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk menjaga kelestarian sumber daya budaya etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu?

Berangkat dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan sistematis terkait warisan budaya Komunitas Etnis Bugis Pagatan di Tanah Bumbu dengan pendekatan pelestarian sumber daya budaya. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana sebaran sumber daya budaya pada Kawasan Etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu?
2. Apa saja nilai penting yang dimiliki oleh sumber daya budaya pada Kawasan Etnik Bugis Pagatan Tanah Bumbu?
3. Bagaimana Potensi pengelolaan sumber daya budaya Kawasan Etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui sebaran sumber daya budaya pada Kawasan Etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu
2. Mengetahui nilai penting yang dimiliki oleh sumber daya budaya pada Kawasan Etnik Bugis Pagatan Tanah Bumbu
3. Mengetahui Potensi pengelolaan sumber daya budaya Kawasan Etnik Bugis Pagatan di Tanah Bumbu

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian terutama mengenai sumber daya budaya dan pemanfaatannya.
2. Menambah referensi akademik pada kajian Arkeologi yang ada di Pagatan.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

#### 1.4.1 Kerangka Konseptual

##### a. Konsep Sumber Daya Budaya menurut UNESCO

Sumber daya budaya menurut UNESCO dipahami sebagai warisan yang memiliki nilai penting bagi umat manusia karena mengandung makna sejarah, ilmiah, sosial, estetika, dan identitas. Melalui Konvensi 1972, sumber daya budaya didefinisikan mencakup monumen, kelompok bangunan, dan situs yang memiliki nilai universal luar biasa dan memerlukan perlindungan serta pengelolaan berkelanjutan. Konsep ini kemudian diperluas dalam Konvensi 2003 yang memasukkan sumber daya budaya takbenda seperti praktik, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan antargenerasi. Dengan demikian, sumber daya budaya mencakup dimensi bendawi (*tangible*) dan takbendawi (*intangible*) yang saling terkait dan membentuk identitas suatu komunitas. UNESCO juga menekankan pendekatan berbasis nilai (*values-based approach*), di mana makna sumber daya budaya tidak semata-mata melekat pada objek, tetapi dibentuk melalui proses sosial dan pengakuan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya budaya tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan nilai, partisipasi komunitas, dan pewarisan kepada generasi mendatang (UNESCO, 1972).

##### b. Cultural Heritage Management

Pendekatan Pendekatan *Cultural Heritage Management* (CHM) digunakan dalam penelitian ini untuk menempatkan tinggalkan arkeologi

Pagatan sebagai sumber daya budaya yang perlu didokumentasikan, dikelola, dan dilestarikan secara berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen warisan budaya, pengelolaan sumber daya arkeologi tidak hanya berfokus pada identifikasi dan dokumentasi, tetapi juga pada penilaian nilai penting serta perencanaan pengelolaan yang mempertimbangkan aspek perlindungan, pemanfaatan, dan keberlanjutan (Darvill, 2005; Avrami, Mason, & de la Torre, 2000). Melalui pendekatan CHM, data sebaran tinggalan arkeologi dipertimbangkan dalam konteks pengelolaan ruang budaya, termasuk identifikasi kawasan bernilai penting, potensi ancaman terhadap situs, serta peluang pemanfaatan bagi kepentingan edukasi dan pengembangan budaya lokal.

#### c. Nilai Penting Sumber Daya Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, nilai penting merupakan landasan utama dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya budaya. Nilai penting dipahami sebagai kualitas atau makna yang menjadikan suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan layak untuk dilestarikan karena kontribusinya terhadap kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Setiap nilai penting memiliki pengertian dan cakupan yang saling melengkapi dalam kerangka pengelolaan sumber daya budaya dalam penelitian ini.

#### d. Cultural Heritage Tourism

Pendekatan *cultural heritage tourism* digunakan sebagai kerangka konseptual tahap lanjut dalam pemanfaatan sumber daya budaya, yang menempatkan sumber daya budaya sebagai aset penting bagi pengembangan pariwisata berbasis nilai sejarah dan kebudayaan. Pendekatan ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya budaya tidak semata-mata berorientasi pada ekonomi, tetapi harus berlandaskan prinsip pelestarian, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap nilai penting sumber daya budaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam kerangka ini, sumber daya budaya dipandang sebagai medium edukatif dan kultural yang mampu memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap sejarah dan kebudayaan suatu wilayah. *cultural heritage tourism* memadukan kepentingan perlindungan sumber daya budaya dengan aktivitas wisata melalui perencanaan yang terarah dan bertahap. Pendekatan ini menempatkan dokumentasi, pemetaan, dan interpretasi sebagai fondasi awal sebelum suatu sumber daya budaya dimanfaatkan untuk pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara eksploitatif, melainkan melalui pengelolaan yang mempertimbangkan daya dukung, keberlanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pemilik dan penjaga sumber daya budaya tersebut. Sebagai tahap lanjut dari pengelolaan sumber daya budaya,

pendekatan *cultural heritage tourism* juga berperan dalam mengintegrasikan aspek pendidikan, pelestarian, dan ekonomi kreatif. Sumber daya budaya dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sejarah dan budaya lokal, sekaligus sebagai daya tarik wisata yang dapat mendorong pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya diukur dari peningkatan kunjungan wisata, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai budaya dapat dilestarikan, dimaknai, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

#### 1.4.2 Penelitian yang relevan

Sejarah dan kebudayaan Pagatan telah dibahas secara komprehensif oleh Rusdi Effendi (2015) dalam karya *Orang Bugis dalam Kerajaan Pagatan dan Budaya Adat Mappanretasi 1735–1912*, yang menguraikan pembentukan Kerajaan Pagatan, struktur kekuasaan, serta peran adat dalam kehidupan masyarakat Bugis Pagatan. Penelitian ini menjadi rujukan utama dalam memahami konteks historis dan kultural Pagatan, meskipun belum menempatkan tinggalan budaya dalam kerangka arkeologi spasial maupun pengelolaan sumber daya budaya. Perspektif yang melengkapi kajian tersebut disampaikan oleh Mansyur (2016) melalui penelitian *Diaspora Bugis Pagatan di Kalimantan Selatan*, yang menekankan aspek migrasi, diaspora, dan pembentukan identitas Bugis di wilayah pesisir sebagai latar sosial-budaya terbentuknya lanskap Pagatan.

Dalam konteks arkeologi dan analisis ruang, penelitian Wasita (2012) berjudul *Karakteristik Situs Arkeologi Kalimantan Selatan Berdasarkan Lokasi Geografis* menunjukkan bahwa pola sebaran situs arkeologi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sungai dan pesisir, sehingga menegaskan relevansi pendekatan spasial dalam kajian arkeologi wilayah pesisir. Pendekatan ini diperkuat oleh kajian Wheatley dan Gillings (2002) dalam *Spatial Technology and Archaeology*, yang menegaskan peran teknologi spasial dan Sistem Informasi Geografis dalam menganalisis sebaran dan lanskap budaya secara sistematis.

Kerangka pengelolaan sumber daya budaya dikembangkan dalam kajian Timothy Darvill (1995) melalui artikel *Value Systems in Archaeology*, yang menekankan pentingnya analisis nilai sebagai dasar pengelolaan dan pelestarian sumber daya budaya. Gagasan tersebut diperkaya oleh Avrami, Mason, dan de la Torre (2000) dalam *Values and Heritage Conservation*, serta oleh Laurajane Smith (2006) dalam *Uses of Heritage*, yang menekankan pendekatan berbasis nilai dan pemaknaan sosial dalam *Cultural heritage management*.

Sementara itu, pemanfaatan sumber daya budaya dalam konteks pariwisata dibahas oleh Timothy dan Boyd (2003) dalam *Heritage Tourism* serta Ashworth, Graham, dan Tunbridge (2007) dalam *Pluralising Pasts: Heritage, Identity and Place*, yang menempatkan pariwisata budaya sebagai tahap lanjut pengelolaan sumber daya budaya yang harus berorientasi pada pelestarian dan keberlanjutan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang Pagatan masih berfokus pada aspek sejarah dan etnografi, sementara

integrasi antara arkeologi spasial, analisis nilai penting, *cultural heritage management*, *cultural heritage management*, dan *cultural heritage tourism* masih terbatas. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian yang menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut sebagai landasan konseptual dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya Pagatan secara berkelanjutan.

Selain kajian sejarah dan konseptual, penelitian yang menyinggung keberadaan objek dan situs arkeologi di wilayah Pagatan dan sekitarnya telah dilakukan dalam lingkup penelitian arkeologi regional Kalimantan Selatan. Penelitian oleh Wasita dan tim Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (2011) dalam laporan Survei Arkeologi di Wilayah Pesisir Tenggara Kalimantan Selatan mengidentifikasi sejumlah tinggalan budaya berupa kompleks makam Islam, indikasi pemukiman lama, serta sebaran artefak permukaan pada kawasan pesisir yang secara historis berkaitan dengan wilayah Kerajaan Pagatan. Penelitian ini menegaskan bahwa kawasan pesisir Pagatan memiliki potensi arkeologis yang signifikan, terutama terkait periode sejarah Islam dan kerajaan-kerajaan lokal pesisir.

Kajian lain dilakukan oleh Wasita (2012) dalam Karakteristik Situs Arkeologi Kalimantan Selatan Berdasarkan Lokasi Geografis, yang mengelompokkan situs-situs arkeologi berdasarkan konteks lingkungan seperti sungai, rawa, dan pesisir. Dalam kajian ini, kawasan pesisir Tanah Bumbu (termasuk Pagatan) disebut sebagai wilayah dengan karakter situs yang berkaitan dengan aktivitas maritim, permukiman sejarah, dan pusat kekuasaan lokal. Penelitian ini relevan karena memberikan kerangka interpretasi geografis terhadap keberadaan objek arkeologi di wilayah pesisir.

Penelitian mengenai situs-situs pemakaman dan jejak kerajaan pesisir juga dilakukan oleh Hartatik (2014) dalam kajian arkeologi Islam di Kalimantan Selatan, yang mencatat bahwa kompleks makam raja dan elite lokal merupakan indikator penting keberadaan pusat kekuasaan dan pemukiman lama. Meskipun tidak berfokus eksklusif pada Pagatan, penelitian ini memberikan konteks arkeologis yang relevan dalam membaca tinggalan berupa makam kerajaan dan struktur terkait di wilayah pesisir selatan Kalimantan.

laporan penelitian Balai Arkeologi Kalimantan Selatan (2016) mengenai Jejak Kerajaan-Kerajaan Lokal di Wilayah Pesisir Kalimantan Selatan juga menempatkan Pagatan sebagai salah satu wilayah penting dalam jaringan kerajaan pesisir. Laporan ini menyebutkan keberadaan tinggalan arkeologi berupa situs pemakaman, indikasi lokasi pusat kerajaan, serta sebaran permukiman lama yang berkaitan dengan aktivitas politik dan maritim. Penelitian ini menegaskan bahwa Pagatan tidak hanya penting secara historis, tetapi juga menyimpan bukti material yang dapat dikaji secara arkeologis.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek dan tinggalan arkeologi di Pagatan telah beberapa kali disinggung dalam penelitian arkeologi regional, terutama dalam konteks survei pesisir dan kajian kerajaan lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat inventarisatif dan deskriptif, serta belum mengintegrasikan analisis spasial digital, penilaian nilai

penting, dan kerangka pengelolaan sumber daya budaya secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka untuk mengkaji sebaran tinggalan arkeologi Pagatan secara lebih sistematis sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya budaya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diuraikan dalam bentuk bab-bab yang saling terkait antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Metode Penelitian, berisi tentang gambaran umum wilayah mengenai kondisi alam lokasi penelitian, dan Metode penelitian

Bab III Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil pengambilan data berupa deskripsi situs secara mendetail, selain itu juga akan diuraikan berupa foto kenampakan situs.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan metode yang mencakup pengumpulan data yang terdiri dari 3 tahap yaitu, tahap pengumpulan data, analisis data, dan penjelasan data. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

##### **2.1.1 Pendekatan Kualitatif**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami tinggalan arkeologi Pagatan berdasarkan makna, fungsi, dan konteks sejarahnya dalam kerangka Kerajaan Bugis Pagatan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi tinggalan benda arkeologi, serta kajian sumber sejarah dan etnografi, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk merekonstruksi dinamika ruang dan sebaran tinggalan budaya yang ada.

##### **2.1.2 Pendekatan Deskriptif-Analitis**

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menginventarisasi dan mengklasifikasikan tinggalan benda arkeologi di Pagatan berdasarkan jenis, kondisi, dan lokasi. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan spasial antar-tinggalan, keterkaitannya dengan faktor lingkungan (pesisir, sungai, pusat kerajaan), serta konteks sejarah Kerajaan Pagatan. Pendekatan ini sesuai untuk penelitian yang bertujuan memaparkan kondisi empiris sekaligus melakukan interpretasi ilmiah terhadap data.

##### **2.1.3 Pendekatan Arkeologi Digital**

Pendekatan arkeologi digital digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah, memvisualisasikan, dan menyajikan data sebaran tinggalan arkeologi di Pagatan dalam bentuk peta infografis. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi pemetaan digital dan sistem informasi geografis (SIG) untuk mengintegrasikan data spasial berupa koordinat tinggalan arkeologi dengan data atribut seperti jenis tinggalan, konteks sejarah, dan kondisi pelestarian. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk peta infografis yang komunikatif dan informatif, sehingga pola sebaran tinggalan arkeologi dapat dipahami secara visual. Peta infografis ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyajian data, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menafsirkan hubungan keruangan antar-tinggalan dan dinamika pemanfaatan ruang budaya Pagatan pada periode 1735–1912.

##### **2.1.4 Pendekatan *Cultural Heritage Management***

Pendekatan *Cultural Heritage Management* (CHM) digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual untuk menempatkan tinggalan arkeologi Pagatan sebagai sumber daya budaya yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa hasil identifikasi, dokumentasi, dan analisis sebaran tinggalan arkeologi tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga berfungsi

sebagai dasar pertimbangan dalam upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya budaya. Dalam konteks ini, CHM memandang tinggalan arkeologi sebagai bagian dari lanskap budaya yang memiliki nilai penting dan memerlukan perencanaan pengelolaan yang terarah.

Melalui pendekatan *Cultural Heritage Management*, penelitian ini mengintegrasikan hasil analisis arkeologi spasial dan arkeologi digital untuk mendukung perencanaan pengelolaan sumber daya budaya secara konseptual. Pendekatan ini berfungsi sebagai tahap lanjut yang menjembatani kegiatan penelitian arkeologi dengan kepentingan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya budaya, termasuk sebagai landasan awal bagi pengembangan *cultural heritage tourism*. Dengan demikian, pendekatan CHM digunakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya budaya dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

## **2.2 Pengumpulan Data**

### **1. Survei Pustaka**

Pengumpulan data pustaka merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Data pustaka bersumber dari berbagai dokumen seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, skripsi, dan arsip yang relevan. Dokumen-dokumen ini diperoleh melalui platform digital seperti Delpher, Leiden, Oldmaps, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Pagatan. Metode ini dilakukan dengan menelusuri laporan hasil penelitian yang membahas Kerajaan Bugis di Kalimantan, sejarah latar belakang Kerajaan Pagatan, serta penelitian yang dapat mendukung penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Melalui proses ini, data pustaka yang terkumpul memberikan landasan teoritis dan historis yang kuat untuk mendukung analisis penelitian.

### **2. Survei Lapangan**

Tahap survei lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi dan merekam secara langsung keberadaan sumber daya arkeologi di wilayah penelitian. Survei lapangan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kota Pagatan dan sekitarnya pada tanggal 13–16 Agustus 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai keberadaan situs, kondisi lingkungan, serta distribusi tinggalan budaya yang berkaitan dengan komunitas Bugis Pagatan. Dalam kajian metode arkeologi, survei lapangan merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi keberadaan tinggalan budaya melalui observasi langsung terhadap artefak, fitur, maupun konteks lingkungan tempat tinggalan tersebut ditemukan. Menurut James Deetz, penelitian arkeologi dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang meliputi pengamatan lapangan, pencatatan konteks, dokumentasi, serta analisis terhadap hubungan antara artefak dan lingkungan tempat ditemukannya (Deetz, 1967). Tahapan ini menekankan bahwa pemahaman terhadap situs arkeologi tidak hanya didasarkan pada objek yang ditemukan, tetapi juga pada konteks ruang dan hubungan antarunsur yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan kerangka metode tersebut, pelaksanaan survei lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Observasi

Tahap ini dilakukan untuk mengenali kondisi umum wilayah penelitian, termasuk karakteristik lingkungan, aksesibilitas situs, serta indikasi keberadaan tinggalan arkeologi. Observasi awal bertujuan untuk menentukan titik-titik lokasi yang memiliki potensi sebagai sumber daya arkeologi.

b. Identifikasi

Setelah observasi awal, dilakukan proses identifikasi terhadap objek atau lokasi yang diduga memiliki kaitan dengan tinggalan budaya komunitas Bugis Pagatan. Proses ini melibatkan pengamatan langsung terhadap bentuk tinggalan, kondisi lingkungan sekitar, serta informasi dari masyarakat setempat mengenai keberadaan situs.

c. Perekaman dan dokumentasi data

Tahap ini meliputi kegiatan *plotting* titik koordinat, deskripsi situs, pengambilan gambar, serta pengukuran objek yang ditemukan di lapangan. Perekaman data dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis spasial. Dokumentasi visual juga dilakukan untuk merekam kondisi fisik situs serta konteks lingkungan tempat tinggalan tersebut berada.

Melalui tahapan tersebut, survei lapangan tidak hanya menghasilkan data mengenai keberadaan situs, tetapi juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara tinggalan arkeologi dengan lingkungan budaya dan ruang aktivitas masyarakat pada masa lalu.

3. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi data sekunder kualitatif yang tidak dapat diperoleh melalui kajian pustaka dan survei lapangan sebagai sumber pelengkap dalam rangka pendukung. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan narasumber di wilayah Pagatan, yakni tokoh masyarakat dan tokoh adat. Melalui wawancara, penulis menggali informasi mengenai sejarah lokal, persebaran lokasi-lokasi yang dianggap penting secara budaya, serta pemaknaan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi yang ada. Data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya interpretasi hasil survei lapangan dan analisis spasial, serta untuk memahami konteks sosial-budaya yang melingkupi tinggalan arkeologi dalam penelitian ini.

### 2.3 Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi dan pengelompokan sumber daya budaya yang berkaitan dengan komunitas etnik Bugis Pagatan, dengan tujuan utama memahami pola sebaran sumber daya budaya dalam konteks ruang. Sebagaimana dijelaskan oleh James Deetz dalam "*Invitation to Archaeology*", studi arkeologi berangkat dari pemahaman terhadap budaya material sebagai refleksi aktivitas manusia, sehingga setiap artefak, fitur, maupun situs perlu dianalisis berdasarkan hubungan spasial dan konteksnya dalam lanskap budaya

(Deetz, 1996).

Data yang diperoleh melalui survei lapangan, dokumentasi visual, dan pengumpulan informasi historis kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber daya budaya, seperti kompleks makam, bangunan keagamaan, serta jejak permukiman. Tahap pengolahan ini dilakukan untuk melihat distribusi sumber daya budaya dalam wilayah penelitian, khususnya pada kawasan pesisir dan sepanjang jalur sungai Kusan yang menjadi ruang aktivitas masyarakat Bugis Pagatan. Dalam praktik arkeologi modern, pengolahan data tidak hanya bertujuan menyusun inventarisasi situs, tetapi juga mengidentifikasi pola distribusi yang dapat memberikan gambaran mengenai struktur ruang masa lalu.

Pengelompokan data juga dilakukan melalui pendekatan spasial dengan memanfaatkan informasi koordinat dan kondisi lingkungan situs. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Paul Bahn dalam bukunya "*Archaeology: A Very Short Introduction*" yang menekankan bahwa pemetaan dan pengorganisasian data merupakan tahap penting untuk memahami bagaimana manusia masa lalu menempati dan memanfaatkan ruang (Bahn, 2012). Dengan demikian, pengolahan data dalam penelitian ini berfungsi sebagai tahap analitis awal untuk memahami sebaran sumber daya budaya komunitas Bugis Pagatan sebelum dilakukan interpretasi lebih lanjut.

## **2.4 Interpretasi Data**

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempatkan sebaran sumber daya budaya sebagai indikator aktivitas sosial dan budaya komunitas Bugis Pagatan dalam konteks sejarah lokal. Dalam pendekatan arkeologi, interpretasi tidak hanya berfokus pada karakter fisik tinggalan budaya, tetapi pada sebaran dan nilai pentingnya.

Interpretasi yang dilakukan tetap berangkat dari data yang diperoleh di lapangan, sehingga kesimpulan mengenai sebaran dan potensi sumber daya budaya didasarkan pada keletakan lokasi situs, kondisi dan nilai pentingnya.

## **2.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tanggal 13-16 Agustus 2023. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.